



**Guide Them Back To The Right Path:
Critical Discourse Analysis of the Ahmadiyah Community
in West Nusa Tenggara Cyber Media**

**Bimbing Mereka Kembali Ke Jalan yang Benar:
Analisis Wacana Kritis Jemaah Ahmadiyah
di Media Siber Nusa Tenggara Barat**

Haris Fatwa Dinal Maula
Gadjah Mada University

Article Information:

Received : 05.02.2022
Revised : 15.03.2022
Accepted : 18.05.2022

Keywords:

Aliran Sesat, Ahmadiyah, Media
Siber, Analisis Wacana Kritis,
Mediatisasi Agama; Hak
Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan

***Correspondence Address:**

haris.f.d@mail.ugm.ac.id

Abstract: *The Ahmadiyah group is a representative case because it is the party that most often feels discrimination and persecution in Indonesia. This study takes a case of Ahmadiyah persecution that occurred in East Lombok in May 2018 as a starting point for how the media framed Ahmadiyah. The purpose of this study is to investigate the ideological motives of the NTB cyber mass media and how the media produce discourses about Ahmadiyah in the context of the tragedy. To achieve this goal, this research uses a qualitative approach by utilizing Norman Fairclough's critical discourse analysis tools. The author analyzes news in three NTB cyber media, radarlombok.co.id, sounduntb.com, and lombokita.com from May to September 2018. The results of this study indicate that the three mass media are mediating religion which has an impact on two consequences, first; the three mass media actually contribute to perpetuating the stigma of heresy against the Ahmadiyah which has an impact on the violation of the rights of the Ahmadiyah community in terms of freedom of religion and belief. Second; In this case, Ahmadiyah's advocacy efforts are framed in the discourse of the NTB regional vision, especially related to the development and reputation of West Nusa Tenggara. This is inseparable from the background of the three mass media which tend to support the state's vision and mission.*

Abstrak: Kelompok Ahmadiyah menjadi kasus yang representatif karena menjadi pihak yang paling sering merasakan diskriminasi dan persekusi di Indonesia. Penelitian ini mengambil satu kasus persekusi Ahmadiyah yang terjadi di Lombok Timur pada bulan Mei 2018 sebagai titik berangkat bagaimana media membingkai Ahmadiyah. Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi motif ideologis media massa siber NTB dan bagaimana media memproduksi wacana tentang Ahmadiyah dalam konteks tragedi tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendayagunakan perangkat analisis wacana kritis Norman Fairclough. Penulis menganalisis berita di tiga media siber NTB, *radarlombok.co.id*, *suarantb.com*, dan

lombokita.com dari Mei hingga September 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga media massa sedang melakukan mediatisasi agama yang berdampak pada dua konsekuensi, pertama; ketiga media massa justru berkontribusi dalam melanggengkan stigma kesesatan terhadap Ahmadiyah yang berdampak pada pelanggaran hak jemaat Ahmadiyah dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kedua; Dalam hal ini, upaya advokasi Ahmadiyah dibingkai dalam wacana visi daerah NTB terutama terkait pembangunan dan reputasi Nusa Tenggara Barat. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang ketiga media massa itu sendiri yang cenderung mendukung visi misi negara.

Pendahuluan

Persinggungan antara agama dan media massa merupakan kata kunci menarik bagi kalangan pengkaji agama dan media. Perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis menjadi alasan tersendiri mengapa diskursus ini selalu relevan. Media massa menjadi semacam alat amplifikasi efektif dalam mendiseminasi pesan-pesan ideologis mengacu pada pasar di mana media tersebut bergerak. Gerak ini cenderung fragmentatif karena begitulah cara media massa membentuk dan menjaga segmentasi pasarnya. Pesan-pesan tersebut kadang juga hanya menjangkau kelas-kelas sosial tertentu karena dalam teori komunikasi kritis, keberpihakan ideologis merupakan hal yang niscaya dalam media.¹

Gerak media ini dapat dibaca jelas terutama ketika mengangkat tentang isu agama di Indonesia. Isu agama yang paling sering diangkat oleh media massa salah satunya adalah tentang diskriminasi oleh kelompok agama tertentu. Menurut survei dari Setara Institute, pada periode 2007-2019 saja telah terjadi lebih dari 2.400 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia. Ahmadiyah menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan diskriminasi dengan 554 kasus, kemudian disusul penghayat kepercayaan 334 kasus, Kristen 328 kasus, pelanggaran hak individu 314 kasus, dan Syiah 153 kasus.² Konflik antar keyakinan ini cenderung menegaskan pola ketimpangan kekuatan antara

¹ Francisco Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 13.

² <https://nasional.tempo.co/read/1271038/setara-ada-2-400-insiden-pelanggaran-kebebasan-beragama>, diakses pada 30 Maret 2022.

kelompok yang mayoritas dan minoritas, atau antara mereka yang dominan dengan mereka yang marginal.³

Islam menjadi satu kajian menarik karena memiliki berbagai aliran keagamaan yang rawan menjadi pemicu konflik. Jika mengacu pada tren konflik hasil survei Setara Institute, Ahmadiyah menjadi kelompok yang paling menonjol. Diskriminasi terhadap Ahmadiyah yang paling mencolok adalah tragedi Cikeusik pada tahun 2011 yang menyebabkan adanya korban jiwa. Konflik horizontal ini merupakan manifestasi dari manuver purifikasi Islam yang memandang Ahmadiyah sebagai kelompok sesat. Berbeda dari pergesekan antara agama besar, konflik terhadap komunitas Islam marginal ini sering berujung pada intimidasi, perusakan properti, penganiayaan, dan pengusiran paksa penganutnya. Pada tahun 2018, intimidasi, perusakan properti, dan pengusiran terjadi pada kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 19 Mei 2018, sekelompok warga Dusun Lauk Eat Desa Greneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, tiba-tiba menyerbu pemukiman warga yang diduga penganut kepercayaan Ahmadiyah dan merusak pemukiman umat Ahmadiyah hingga mereka terpaksa mengungsi.⁴ Berita tentang persekusi ini dimuat dalam media-media massa lokal di Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini menganalisis ideologi di balik tiga media massa siber NTB dalam mewartakan tragedi persekusi Ahmadiyah di Lombok Timur. Media massa yang dianalisis adalah media massa berbasis siber yaitu *radarlombok.co.id*, *suarantb.com*, dan *lombokita.com*. Kajian tentang konflik Ahmadiyah di media massa sudah banyak dilakukan. Andi Subhan Amir dan Andi Muhammad Hasrum menulis tentang konflik Ahmadiyah dalam potret media cetak dalam judul '*Ahmadiyah Dalam Potret Media Cetak (Analisis Isi Berita Surat Kabar Kompas, Republika, dan Suara Pembaruan)*'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media cetak menyajikan pemberitaan kasus Ahmadiyah di Cikeusik secara objektif dengan melihat kerusakan Cikeusik sebagai masalah hukum. Topik berita

³ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies, 2018).

⁴ <https://radarlombok.co.id/6-rumah-warga-ahmadiyah-dirusak-massa.html>, diakses pada 30 Maret 2022.

yang paling dominan dalam penyajian berita kasus Ahmadiyah di harian Kompas, Republika, dan Suara Pembaruan adalah tentang hukum. Persentase untuk kategori ini sebesar 65%, lebih dari separuh dari total 210.⁵

Kajian tentang Ahmadiyah juga dilakukan oleh Rindang Senja Andarini dalam tulisannya '*Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Ahmadiyah pada Harian Jawa Pos*'. Melalui metode analisis framing, Jawa Pos digambarkan belum menerapkan jurnalisme damai. Asumsi itu ditandai dengan penggunaan '*victimizing*' dan '*demonizing language*'. Jawa Pos lebih memilih pemberitaan yang mendramatisir yang justru semakin mendiseminasi stigma terhadap Ahmadiyah dan para pengikutnya.⁶ Studi tentang Ahmadiyah di media online dikaji oleh Gun Gun Heryanto dalam judul '*Ahmadiyah di Media Online*'. Media baru yang menempatkan 'internet' sebagai instrumen utama, memberikan ruang bagi weblogger Kompasiana untuk mempersepsi Ahmadiyah lewat publikasi online yang difasilitasi Kompasiana. Penelitian Gun Gun menemukan bahwa isu tentang Ahmadiyah tidak lagi berkutat pada masalah aqidah, namun juga tentang Hak Asasi Manusia dan hukum.⁷

Media online merupakan instrumen produksi dan distribusi informasi dengan waktu yang relatif lebih cepat dibanding melalui media konvensional seperti cetak atau *broadcasting* ⁸. Diseminasi yang cepat dan masif tersebut kemudian mempengaruhi mitra tutur media, yaitu pembaca media daring, yang cenderung lebih memilih sumber informasi yang instan. Hal ini yang masih belum terjangkau dari berbagai penelitian tentang Ahmadiyah di media massa.

Kerangka teori yang menjadi landasan berpikir tulisan ini adalah Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Ideologi, menurut Fairclough, bukanlah sebuah

⁵ Andi Subhan Amir and Andi Muhammad Hasrum, "Ahmadiyah Dalam Potret Media Cetak (Analisis Isi Berita Surat Kabar Kompas, Republika, Dan Suara Pembaruan)," *Jurnal Komunikasi PROFETIK* 6, no. 1 (2013): 67–82.

⁶ Rindang Senja Andarini, "Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Ahmadiyah Pada Harian Jawa Pos," *Jurnal Interaksi* 3, no. 1 (2014): 85–93.

⁷ Gun Gun Heryanto, "Polemik Ahmadiyah Di Media Online," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 10, no. 2 (2016): 174–198.

⁸ Julia T. Wood, *Communication Mosaics: An Introduction to the Field of Communication* (Boston: Cengage Learning, 2011); Einar Thorsen and Daniel Jackson, "Seven Characteristics Defining Online News Formats," *Digital Journalism* 6, no. 7 (2018): 847–868.

idealisme atau seperangkat sistem berpikir yang sistematis, melainkan sebuah 'worldview' atau 'common sense'. Dalam istilah lain, ideologi berarti sebuah cara pandang terhadap dunia yang telah disepakati secara konsensual.⁹ Penelitian ini mengasumsikan bahwa media massa siber menjadi instrumen yang bukan hanya efektif, namun juga efisien dalam melanggengkan narasi keagamaan yang rawan memicu konflik antar penganut kepercayaan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif. Data dari penelitian ini merupakan berita yang terbit di tiga media massa berbasis siber di Nusa Tenggara Barat yang mewartakan tentang tragedi persekusi Ahmadiyah di Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada 19 Mei 2018. Data yang akan dianalisis adalah pemberitaan di rentang bulan Mei-September 2018. Penelitian ini berasumsi bahwa berita-berita tentang persekusi Ahmadiyah di rentang bulan tersebut tidak menjauh dari konteks tragedi persekusi Ahmadiyah di pertengahan bulan Mei 2018 sehingga sangat relevan untuk diteliti. Ketiga media massa tersebut adalah *radarlombok.co.id*, *suarantb.com*, dan *lombokita.com*.

Pemilihan tiga media tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*; kredibilitas media yang dilihat dari apakah media tersebut terverifikasi dalam Dewan Pers. *Kedua*; popularitas media massa itu sendiri yang dilihat dari pengikut di media sosial masing-masing media massa. *Ketiga*; porsi dan intensitas media dalam memberitakan kasus persekusi Ahmadiyah. Dalam kasus tiga media NTB di atas, media yang terverifikasi oleh dewan pers hanyalah *radarlombok.co.id* dan *suarantb.com*. Media *lombokita.com* dipilih karena menjadi media massa berbasis siber yang paling banyak memberitakan tragedi persekusi Ahmadiyah Lombok Timur.

Kerangka teori yang digunakan adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai praktik sosial dan berfokus pada hubungan antara ideologi dan kekuasaan yang diekspresikan

⁹ Norman Fairclough, *Language and Power*, Second Edi. (New York: Routledge, 2001), 2.
Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 02 (01) 2022| 111

melalui bahasa ¹⁰. Seperti yang telah dijelaskan di pendahuluan, ideologi dalam pengertian ini mengacu pada bagaimana pandangan media massa terhadap realitas yang diekspresikan melalui bahasa berita. Menurut Fairclough, bahasa merupakan instrumen utama untuk mengidentifikasi ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Bahasa terangkai dalam praktik wacana yang menampilkan pola sosial di mana ketimpangan itu bisa diidentifikasi.

Oleh karena itu, bahasa tidak berdiri sendiri, ia membutuhkan konteks produksi teks, konteks konsumsi teks, dan aspek sosio-kultural yang mempengaruhi produksi teks.¹¹ Untuk mengelaborasi aspek-aspek itu, Fairclough menawarkan tiga langkah analisis. *Pertama*, analisis deskriptif. Pada tahap ini, Fairclough menekankan pentingnya menyelidiki proses produksi teks melalui aspek kebahasaan.¹² Analisis kedua adalah interpretasi. Interpretasi digunakan untuk menganalisis proses bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi oleh pembaca. Analisis ketiga adalah Eksplanasi. Eksplanasi berfungsi untuk menggambarkan wacana sebagai bagian dari praktik sosial dan menunjukkan determinasi wacana terhadap struktur sosial dan efek reproduktifnya terhadap struktur tersebut, baik pengaruhnya untuk membentuk atau mengubah struktur tersebut.¹³

Bingkai Agama Dalam Media

Tulisan ini mengkaji persinggungan agama dan media dalam perspektif mediatisasi agama dengan menggunakan pemetaan agama dalam ruang publik media milik Stig Hjarvard. Dalam tulisannya, *Three Forms of Mediatized Religion: Changing the Public Face of Religion* Hjarvard meletakkan relasi agama dan media dalam tiga formasi; agama dalam bingkai jurnalisme sekuler, agama sebagai instrumen hiburan dan ekspresi budaya populer, dan agama dalam media keagamaan yang dijalankan oleh lembaga keagamaan. Dalam ketiga ranah

¹⁰ Paul Baker and Sibonile Ellece, *Key Terms in Discourse Analysis*. (New York: Continuum International Publishing Group, 2011), 26.

¹¹ Norman Fairclough, *Discourse and Social Change* (Cambridge: Polity Press, 1992).

¹² Ibid., 97–100.

¹³ Fairclough, *Language and Power*, 135.

tersebut, peran media diasumsikan tidak hanya sekedar mengamplifikasi pesan atau konten keagamaan, namun juga dalam merekonstruksi agama di ruang publik. Tesis Hjarvard tersebut tidak membahas religiositas individu dalam ruang media massa, melainkan bagaimana interaksi antara agama dan media yang kemudian ditampilkan sebagai bagian dari ruang publik.¹⁴

Dalam konteks agama dalam jurnalistik sekuler, media diasumsikan berpegang pada norma-norma sekuler. Hjarvard menyebut aktivitas di bidang ini sebagai 'jurnalisme agama'. Ranah jurnalisme ini membawa agama ke dalam ruang publik politik sekaligus menyaratkan agama untuk tunduk pada paradigma dominan jurnalisme tersebut.¹⁵ Hal itu berbeda dengan agama dalam ruang budaya. Hjarvard menyebut bentuk agama dalam ruang budaya sebagai '*banal religion*'. Media, melalui berbagai simbol dan tindakan yang secara implisit membawa agama, mungkin secara tidak sengaja dapat memperkuat kehadiran agama dalam budaya dan masyarakat. Tentu saja, para pekerja media ini harus mempunyai kesadaran tentang misi itu. Kesadaran tersebut untuk menjamin bahwa simbol religiusitas yang dibawa ke ranah media membawa pesan dan nilai. Aktor-aktor yang melibatkan diri dengan agama dalam bidang ini adalah mereka yang bergerak di industri budaya dan hiburan, misalnya penulis fiksi, pembuat film, musisi, produser hiburan di televisi, desainer game komputer atau orang yang bergerak di industri kreatif. Lingkup ini mencakup ekspresi budaya klasik terutama yang berkaitan dengan budaya populer yang terlihat di majalah gaya hidup, serial televisi, novel, dan film.¹⁶

Ruang perjumpaan ketiga adalah agama dalam bingkai media keagamaan. Ruang media keagamaan adalah ruang media yang berada dalam internal lembaga-lembaga keagamaan. Lingkup media ini dapat mencakup buku dan jurnal keagamaan, surat kabar, saluran radio, televisi, halaman *web*, bahkan media sosial milik sebuah lembaga keagamaan tertentu yang ditujukan untuk pembaca agama tersebut. Mereka mungkin bertujuan untuk 'menjangkau' publik,

¹⁴ Stig Hjarvard, "Three Forms of Mediatized Religion Changing the Public Face of Religion," in *Mediatization of Religion: Nordic Perspective*, ed. Stig Hjarvard and Mia Lovheim (Goteborg: Nordicom: University of Gothenburg, 2012), 24.

¹⁵ Ibid., 31.

¹⁶ Ibid., 34.

namun utamanya media itu hanya difungsikan dalam komunitas iman mereka sendiri. Hjarvard menyebut mereka dengan '*religious media*', menggabungkan media massa dan media jejaring sosial dengan kehadiran publik. *Religious media*, menurut Hjarvard, adalah praktik media yang dikendalikan dan dioperasikan oleh aktor-aktor agama.¹⁷

Secara garis besar, tesis Hjarvard mengungkap bahwa persinggungan agama dan media pada saat ini tidak sekedar menampilkan mediasi agama, melainkan juga apa yang disebut dengan mediatisasi agama. Jika mediasi agama hanya menyuguhkan media sebagai jembatan antara audience dengan institusi keagamaan, mediatisasi agama beranjak lebih dalam di mana media menjadi sumber penting pembawa ideologi yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dan menuntut mereka untuk menyesuaikan diri dengan logika media. Oleh sebab itu, mediatisasi agama melahirkan audience sebagai satu variabel kajian penting. Mengkaji audience sebagai sebuah gejala sosial menjadi tantangan tersendiri bagi kajian agama dan media.

Hasil dan Pembahasan

Berita adalah produk perusahaan media dan mencerminkan kepentingan pemilik, manajer, dan editor mereka. Media dapat menyampaikan berita secara netral, tetapi juga dapat mengemas laporan dengan kecenderungan yang sempit dan berprasangka. Media Indonesia, disadari atau tidak, turut andil dalam gejolak hubungan antaragama dan keragaman perilaku bangsa. Ketika ada ketegangan atau masalah antaragama, media menjadi saluran untuk pemberitahuan publik. Cara media memberitakan ketegangan dan konflik, termasuk isu lintas agama, menjadi penting di sini, karena dapat mempengaruhi masyarakat.

Surat kabar harian Radar Lombok didirikan pada tanggal 9 Februari 2009, berbarengan dengan Hari Pers Nasional. Koran tersebut diniatkan untuk mempromosikan koran di Lombok Timur dan menjadikan radar lombok sebagai koran yang diminati oleh semua kalangan, bukan hanya kalangan pejabat saja. Radar Lombok terus aktif hingga tahun 2013, karena jumlah pemasukan iklan yang besar dan pelanggan yang tersebar di seluruh pulau Lombok dan luar NTB.

¹⁷ Ibid., 28.

Grup Jawa Pos memegang saham terbesar Radar Lombok sebanyak 75% dan 25% dari pemilik koran yaitu Ismail Husni. Radar Lombok bekerjasama dengan pemerintah Lombok Timur sejak diterbitkan yang membuat pemerintah daerah memiliki saham sebanyak 10%. Namun pada tahun 2013 kerjasama itu dihentikan.¹⁸ Tetapi walaupun kerjasama dengan pemerintah berakhir, radar lombok tetap dilihat sebagai bagian dari Jawa Post Group yang kerap menjadi amplifikator efektif kinerja-kinerja pemerintah, hal ini dilihat dari bagaimana *jawapos.com* memberikan kolom khusus tentang Ibu Kota Negara Baru (IKN) untuk mengantarkan pembaca pada satu mega proyek negara terbaru.

Suara NTB merupakan surat kabar Indonesia yang terbit di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Suara NTB merupakan anak perusahaan dari Bali Post (PT. Bali Post) yang merupakan bagian dari kelompok Media Bali Post yang dimiliki oleh keluarga Ketut Nadha dan keluarga Satria Naradha. Secara online, harian Suara NTB terbit dalam situs *suarantb.com* yang dikelola secara terpisah, namun masih dalam lingkup kerjasama dengan Harian Suara NTB. Surat kabar ini memiliki tagline '*Pengemban Pengamal Pancasila*'. Motto tersebut jelas mengindikasikan sisi ideologis media yang nasionalis sekaligus pancasilais.

Berbeda dengan kedua media di atas yang muncul pertama kali dalam bentuk cetak, *lombokita.com* muncul sebagai media massa lokal pertama NTB yang berbasis siber secara utuh. *Lombokita.com* didirikan pada 18 November 2013 dan bekerjasama dengan pihak Pemprov NTB sebagai media dari beberapa peliputan informasi serta kegiatan dari Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur NTB memiliki hampir semua saham yang ada di media ini.

Narasi Viktimisasi Ahmadiyah dalam Media

Pemberitaan tentang jemaat Ahmadiyah didominasi oleh narasi viktimisasi. Narasi ini menempatkan Jemaat Ahmadiyah Lombok Timur sebagai korban yang lemah dan pasif, tidak mampu membantu dan memberdayakan komunitasnya sendiri. Mereka digambarkan tidak mampu secara mandiri mencoba menyelesaikan konflik. Media cenderung memposisikan institusi Pemprov NTB dan pihak lain sebagai sekutu dan penyelamat yang memiliki kekuatan untuk

¹⁸ Badarudin et al., "Perkembangan Dan Eksistensi Surat Kabar Di Lombok Timur Tahun 1986-2013," *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* 8, no. 2 (2021): 42–43.

membantu minoritas yang tak berdaya. Misalnya dalam *lombokita.com* yang bertajuk '*Komunitas Muslim Ahmadiyah di Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, NTB, diteror sekelompok orang yang menyerang dan merusak rumah*'¹⁹. Ada tiga kata yang memiliki kesamaan makna, yaitu 'diteror', 'menyerang', dan 'merusak'. Kata tersebut mengindikasikan posisi Ahmadiyah sebagai objek persekusi. Narasi viktimisasi ini juga dikutip dalam *radarlombok.co.id* yang bertajuk '*6 Rumah Warga Ahmadiyah Dirusak Massa*'²⁰. Menurut Fairclough, penggunaan kalimat pasif dilihat sebagai upaya mengurangi pemborosan kata karena agen atau pelaku tindakan diasumsikan sudah diketahui bersama.²¹ Media dalam hal ini, menggarisbawahi posisi Ahmadiyah sebagai objek diskriminasi dalam berita-beritanya.

Dalam mengutip proses mitigasi Ahmadiyah, media cenderung mengutip pihak-pihak dari luar Ahmadiyah. *Suarantb.com*, misalnya, mengutip dialog gubernur NTB, Tuan Guru Bajang, dengan warga Greneng dan Ahmadiyah, gubernur mengatakan akan menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja, kata TGB, akan memakan waktu karena masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Media yang sama juga memberitakan tentang anggota DPRP Lombok Timur yang mendesak Pemkot Lombok Timur untuk segera menyelesaikan kasus Ahmadiyah.

Media juga memberikan porsi dari pihak Ahmadiyah untuk berbicara. Dalam berita berjudul '*Jemaat Ahmadiyah Diserang, Dipaksa Tetap di Kantor Polisi*', *lombokita.com* mengutip keterangan tertulis dari Sekretaris Pers PB Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana;

*"Kelompok yang berasal dari daerah yang sama melakukan penyerangan dan kerusakan karena sikap kebencian dan intoleransi pada paham keagamaan yang berbeda," kata Yendra.*²²

Saat media mengutip pihak luar Ahmadiyah, yang dibicarakan adalah tentang penanganan jemaah Ahmadiyah yang menjadi korban penyerangan dan

¹⁹ *lombokita.com*, 20/5/18.

²⁰ *radarlombok.co.id*, 21/5/2018.

²¹ Fairclough, *Language and Power*, 104.

²² *lombokita.com*, 20/5/2018.

pengusiran. Seperti dalam berita yang berjudul '*Warga Ahmadiyah Terima Bantuan Perbaikan Rumah*'²³, *radarlombok.co.id* hanya mengutip pihak yang memberikan bantuan, seperti Kepala Bidang Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik, Pj Bupati Lombok Timur, H Lalu Syafi'i, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bangkospoldagri) Lombok Timur, Sudirman. Jika menyebut Ahmadiyah, media cenderung memposisikan mereka sebagai pihak yang lemah. Misalnya, dalam berita yang dimuat *radarlombok.co.id* berjudul '*Jemaah Ahmadiyah Tagih Janji Gubernur NTB*', media mengutip salah satu jemaah Ahmadiyah, Edo;

*Selain menunggu janji Gubernur, dia juga menunggu pemerintah daerah untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi warga jemaah ahmadiyah. Karena selama di dalam penampungan, ia dan jemaah lainnya tidak bisa melakukan aktivitas (bekerja). "Anak saya banyak, kalau saya tidak kerja mau makan apa? Makanya saya tuntutan janji pemerintah daerah, untuk mengusahakan kita mendapatkan pekerjaan," tuntutan.*²⁴

Wacana ini cenderung menyepelkan upaya dan inisiatif minoritas dan justru menempatkan mereka pada posisi yang lebih rentan. Pada tataran praktik sosial, wacana ini menimbulkan dampak sosial berupa langgengnya stigma antara mereka yang dominan dan yang terpinggirkan. Kelompok dominan dibingkai sebagai pihak yang memiliki kuasa untuk melakukan apa saja terhadap kaum marginal, baik dalam bentuk penganiayaan atau bahkan dalam bentuk advokasi. Secara demografi, lebih dari 96% penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam.²⁵ Menurut catatan Setara Institute, pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Nusa Tenggara Barat paling banyak terjadi terhadap jemaah Ahmadiyah.²⁶ Artinya, wacana tersebut hanya akan menegaskan posisi

²³ *radarlombok.co.id*, 12/9/2018.

²⁴ *radarlombok.co.id*, 26/6/2018.

²⁵ <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-penduduk-menurut-agama>, diakses pada 30 Maret 2022.

²⁶ Halili and Bonar Tigor Naipospos, *From Stagnation To PickThe New Hopes: The Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2014*, ed. Ismail Hasani and Suryadi A. Radjab (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015).

Ahmadiyah sebagai kaum marginal di Nusa Tenggara Barat dan pihak yang hanya mendapat atensi saat ada konflik.

Kuasa kaum dominan dalam hal ini misalnya seperti yang diberitakan oleh *suarantb.com* dalam tajuk, 'Soal Ahmadiyah, Dewan Desak Pemkab Lotim Berikan Solusi Jelas'. Dalam salah satu kutipannya, media menulis;

Menurut Martawani, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus melakukan pendekatan terhadap warga Ahmadiyah untuk bagaimana pemahaman dan keyakinan mereka dikembalikan ke ajaran Islam yang sesungguhnya. Proses lokalisasi terhadap tempat tinggal warga Ahmadiyah bukanlah merupakan solusi. "Solusinya itu bagaimana mengembalikan pemahaman mereka, harus kembali ke ajaran Islam yang sesungguhnya. Diberikan tempat tinggal yang khusus bukanlah solusi untuk mereka," tegasnya.²⁷

Frase 'dikembalikan ke ajaran Islam yang sesungguhnya' menyiratkan sebuah proses keluar dari situasi yang dianggap salah kemudian masuk dalam kebenaran. Dalam bahasa agama, frase tersebut bisa diistilahkan dengan 'tobat'. Berita tersebut mengindikasikan bahwa kelompok dominan, khususnya aktor-aktor negara, memiliki kuasa termasuk dalam menentukan solusi yang tepat bagi Ahmadiyah. Dalam hal ini, *suarantb.com* mengutip Martawani, Anggota Komisi III DPRD Lombok Timur, bahwa solusi yang harus diambil adalah mengembalikan komunitas Ahmadiyah pada ajaran Islam yang benar dan tidak memberi mereka pemukiman yang baru. Wacana ini, tidak hanya semakin mempertegas batas antara yang kuasa dan yang lemah, tetapi juga menebalkan stigma sesat pada kelompok Ahmadiyah.

Potret Ahmadiyah Dalam Media

Dari tiga media massa yang dikaji, hanya dua media massa di Lombok yang memberitakan secara khusus tentang tragedi penyerangan Ahmadiyah di Greneng, yaitu *radarlombok.co.id* dan *lombokita.com*. Kedua media online tersebut menyebut Ahmadiyah ke dalam banyak terminologi berbeda.

²⁷ *suarantb.com*, 6/6/2018.

Lombokita.com menempatkan kata '*Muslim*' sebelum Ahmadiyah dengan narasi utuh Berbeda dengan *radarlombok.co.id* yang menempatkan kata '*pemeluk kepercayaan*', bukannya menambahkan nama agama Islam. Judul kedua berita tersebut juga berbeda dari segi pemilihan diksi. *Lombokita.com* menggunakan judul '*Jamaah Ahmadiyah Diserang, Terpaksa Nginap di Kantor Polisi*'²⁸, sedangkan *radarlombok.co.id* menggunakan judul '*6 Rumah Warga Ahmadiyah Dirusak Massa*'²⁹. Menurut Fairclough, konstruksi frase dan hubungan antara kata merupakan satu bentuk hegemoni³⁰. Pemilihan diksi tersebut dalam hal ini, mencerminkan posisi kedua media. Dalam hal ini, *lombokita.com* terlihat lebih lentur dalam menyebut Ahmadiyah, dibanding *radarlombok.co.id*.

Pemilihan diksi tersebut juga menjadi cermin polemik kelompok Ahmadiyah di Indonesia. perdebatan tentang status Ahmadiyah berimplikasi pada bagaimana media membingkai jemaat Ahmadiyah dalam berita. Penyebutan yang berbeda tersebut merujuk pada perdebatan tentang status Ahmadiyah sebagai salah satu aliran Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan Islam yang memiliki kewenangan mengatur urusan umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan dua fatwa tentang aliran sesat Ahmadiyah. Fatwa pertama dikeluarkan pada 1 Juni 1980 yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah telah meninggalkan ajaran Islam dan sesat. Fatwa kedua dikeluarkan pada 29 Juni 2005 ketika Majelis Musyawarah Nasional VII MUI menegaskan fatwa pertama bahwa Ahmadiyah sesat dan siapa pun yang mengikuti Ahmadiyah adalah kafir. MUI menekankan bahwa siapa pun yang telah mengikuti Ahmadiyah didorong untuk meninggalkan dan kembali ke ajaran Islam yang benar. MUI juga mendorong pemerintah untuk melarang organisasi Ahmadiyah.³¹

Statemen MUI tersebut menjadi salah satu referensi ideologi media dalam membingkai Ahmadiyah dalam berita. Di satu hal, media juga bersepakat tentang

²⁸ *lombokita.com*, 20/5/2018.

²⁹ *radarlombok.co.id*, 21/5/2018.

³⁰ Fairclough, *Discourse and Social Change*, 77.

³¹ Ketetapan Majelis Ulama Indonesia No. 11/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005.

status kesesatan Ahmadiyah. Hal itu disampaikan ketika media membincang tentang pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah. *Radarlombok.co.id* misalnya menulis berita dengan judul '*Lotim Larang Penyebaran Paham Ahmadiyyah*'. Dalam teks berita tersebut, terdapat beberapa kosakata yang secara ideologis menggambarkan pola klasifikasi tertentu. Hal ini seperti yang terdapat dalam kutipan berikut:

Dalam kesempatan itu, gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menyempatkan diri berkomunikasi dengan warga setempat. TGB menggali informasi dengan mendengar keterangan warga. Bahwa, kerusakan rumah jemaah Ahmadiyyah itu terjadi karena acapnya jemaah ini mengingkari janji.

Di mana sebelumnya, jemaah Ahmadiyah yang hanya sejumlah hitungan jari itu berjanji tidak akan menyebarkan pahamnya kepada masyarakat lain. Mereka juga sudah berjanji bersedia kembali kepada ajaran Islam sesungguhnya. Namun, mereka kembali mengingkari janji dengan kembali ke pemahaman mereka.³²

Terdapat dua pasang kata yang digunakan untuk mencerminkan karakter Ahmadiyah di Lombok Timur, '*berjanji*' dan '*mengingkari janji*'. Kata '*kembali*' didayagunakan untuk menunjukkan bahwa pengingkaran janji oleh Ahmadiyah terjadi secara berulang dalam kasus-kasus sebelumnya. *Radarlombok.co.id* menggunakan kata '*sejumlah hitungan jari*' yang menegaskan kekuatan dominan di Lombok Timur. Media bisa saja menggunakan kata '*minoritas*', untuk merujuk jemaat Ahmadiyah, tetapi metafor '*hitungan jari*' lebih dipilih sebagai penegasan citra mayoritas-minoritas di sana.

Berita tersebut juga menggunakan kata '*sesungguhnya*' setelah frase '*ajaran Islam*'. Diksi tersebut menggambarkan ideologi media dalam melihat ajaran Islam di Indonesia, khususnya di Lombok Timur. Secara tidak langsung, kata '*sesungguhnya*' berarti mengandaikan hal sebaliknya, yaitu '*kesalahan*'. Konstruksi frase '*kembali ke ajaran Islam sesungguhnya*' merupakan *rewording* dari kata '*tobat*'. Dalam bahasa Fairclough, *rewording* berarti pemilihan diksi

³² *radarlombok.co.id*, 22/05/2018.

berbeda yang merujuk pada makna yang sama. Dalam berita, media membingkai narasi tobat jemaat Ahmadiyah dengan sejumlah konsekuensi. *Lombokita.com* memberitakan tentang pertobatan Ahmadiyah dalam beritanya yang berjudul ‘*Jemaat Ahmadiyah Sakra Timur Bertobat*’. Dalam salah satu kutipannya, ditulis;

*Camat Sakti, HL.Muslim meminta kepada masyarakat untuk menerima warga kita yang saat ini telah bertaubat dengan menyatakan diri kembali ke agama islam. Dengan meninggalkan Ahmadiyyah sehingga harus di rangkul dan jangan dianggap musuh lagi,karena semuanya kita sebagai warga bangsa indonesia bersaudara.*³³

Petikan berita tersebut memuat sebuah sebab-akibat dalam kata ‘*sehingga*’. Kata ‘*sehingga*’ merupakan kata hubung yang merelasikan antara sebab dan akibat. Dalam kasus ini, sebab Ahmadiyah bisa dirangkul dan diterima oleh masyarakat adalah karena mereka sudah menyatakan diri kembali ke agama Islam. Berita tersebut juga menyuratkan bahwa Ahmadiyah yang telah bertaubat tidak lagi dianggap musuh. Kata ‘*musuh*’ merupakan antonim dari ‘*teman*’. Pilihan diksi ini mengandaikan sisi ideologis media yang kuat dalam membingkai posisi sosial Ahmadiyah. Dampak sosial praktisnya adalah penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah akan menjadi wajar, karena mereka sudah dipersepsikan sebagai ‘*musuh*’. Kutipan berita tersebut menggunakan kata ‘*harus*’ yang berarti sebuah tuntutan atau kewajiban. Kata ‘*harus*’ dalam konteks berita tersebut juga sekaligus menyajikan tawaran menarik kepada para jemaat Ahmadiyah, bahwa status sosial mereka akan aman dan sejahtera jika mereka kembali kepada ajaran Islam yang benar.

Pihak yang dikutip oleh *lombokita.com* adalah Camat yang merupakan aktor negara. Dalam hal ini, media melegitimasi status Ahmadiyah dengan melibatkan pernyataan-pernyataan yang keluar dari aktor-aktor negara. Aktor negara lain yang dikutip adalah Kepala Polisi Sektor Sakra Timur, Ipda L. Marhum. Kutipannya berbunyi ‘*Sementara Kapolsek Sakti, Ipda L. Marhum mengharapkan agar semua masyarakat menerima salah seorang warga kita yang telah bertaubat ini. Sehingga harus di rangkul agar diterima oleh semua masyarakat yang ada*’³⁴.

³³ *lombokita.com*, 20/06/2018.

³⁴ *lombokita.com*, 20/06/2018.

Kedua aktor negara yang dikutip *lombokita.com* menggunakan diksi-diksi yang merujuk pada keterikatan dan kedekatan, misalnya '*warga negara*', '*warga bangsa Indonesia*', dan '*saudara*'. Status tersebut secara *vis a vis* dibenturkan dengan kata '*musuh*' yang mewakili antonim dari ketiga diksi sebelumnya. Ketiga diksi ini digunakan sebagai identifikasi antara pemeluk Islam yang benar dengan jemaat Ahmadiyah. Efek sosial yang muncul dari wacana ini adalah jika jemaah Ahmadiyah tidak bertaubat, maka warga sekitar akan menafikan tiga kata tersebut dari jemaat Ahmadiyah. Mereka akan dipersepsi sebagai '*musuh*', '*bukan warga Indonesia*', dan '*bukan saudara*'. Implikasinya, hak-hak mereka sebagai warga negara bisa jadi akan ikut terabaikan.

Berita tentang pertobatan jemaah Ahmadiyah tidak ditemukan di *radarlombok.co.id* dan *suarantb.com*. Berita tersebut hanya muncul di *lombokita.com* hanya dalam dua pemberitaan, masing-masing dengan redaksi dan penekanan yang berbeda dalam membingkai taubat jemaah Ahmadiyah. Perbedaan yang paling kentara adalah di satu sisi taubat jemaah Ahmadiyah akan diterima oleh masyarakat jika hanya melibatkan satu orang. Di sisi lain, jika yang bertobat adalah sebuah komunitas, keluarga misalnya, maka tobat itu akan dipertimbangkan. Seperti yang dikutip oleh *lombokita.com*, '*Maka dari para tokoh-tokoh yang ada sedang melakukan pengkajian terhadap keinginan satu keluarga tersebut. Apakah memang betul ingin kembali ke ajaran islam ataukah hanya sekedar berpura-pura dan maksud lainnya, sehingga ini yang sedang kami perdalam*'³⁵. Media menggunakan kata '*berpura-pura*' ketika membincang tentang pertobatan Ahmadiyah. Makna '*kepura-puraan*' juga tersirat dalam berita yang ditulis oleh *radarlombok.com*, '*Padahal, pada beberapa bulan yang lalu para pengikut ini sudah bersumpah dan bersedia kembali ke ajaran yang benar. Namun, janji-janjinya diingkari. "Bukan kali ini saja jemaah ini meresahkan, tahun 2017 yang lalu sudah bersumpah dan bersedia kembali ke Islam yang benar. Tapi saat ini muncul lagi," sesalnya*'³⁶. Dalam hal ini, media secara tidak langsung menggambarkan prasyarat khusus terhadap jemaat Ahmadiyah bahwa pertobatan yang dilakukan harus dilakukan secara tulus, bukan hanya asal tobat.

³⁵ *lombokita.com*, 21 Juni 2018.

³⁶ *radarlombok.co.id*, 21/5/2018.

Ahmadiyah dan Visi Pembangunan Daerah

Pasca penyerangan yang mengakibatkan rusaknya permukiman jemaah Ahmadiyah, Pemkot Lombok Timur melakukan evakuasi jemaah di Balai Latihan Kerja 'Latihan Khusus Kohati' (LKK) Kota Mataram. Ketiga media massa Lombok memberitakan tentang evakuasi tersebut. *Radarlombok.co.id* menerbitkannya dengan judul '*Kota Mataram Tutup Pintu Untuk Pengungsi Ahmadiyah*'. Dalam pembukaan berita, *radarlombok.co.id* memberikan informasi bahwa Kota Mataram ingin melepaskan diri dari label '*daerah pengungsi*'. Seperti dalam kutipan,

*Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram serius berupaya melepaskan label sebagai daerah pengungsi. Ini dilakukan utamanya untuk pengikut jemaat Ahmadiyyah yang saat ini masih ditampung di Asrama Transito Majeluk Kota Mataram.*³⁷

Label '*daerah pengungsi*' disebutkan *radarlombok.co.id* tanpa memberikan konteks mengapa Kota Mataram diklaim sebagai daerah pengungsian. Pada kalimat kedua, *radarlombok.co.id* menggunakan kata '*utamanya*' sebagai *rewording* untuk kata '*terutama*' atau '*khususnya*'. Dalam konteks pemberitaan, Ahmadiyah dibingkai sebagai pihak yang bertanggung jawab menjadikan Kota Mataram sebagai kawasan yang lekat dengan label '*daerah pengungsi*'. Hal itu ditunjukkan dengan pemilihan *headline* berita dan informasi utama di tubuh berita. Tajuknya adalah '*Kota Mataram Tutup Pintu Untuk Pengungsi Ahmadiyah*', sedangkan kontennya memuat tentang upaya Pemkot menghapus label '*daerah pengungsian*'.

Tema yang sama juga diberitakan *suarantb.com* dengan tajuk '*Pemkot Mataram Tolak Tampung Pengungsi Ahmadiyah dari Lombok Timur*'. Media mengutip,

Pemkot Mataram, akan menolak menampung pengungsi warga Ahmadiyyah pasca insiden pengerusakan rumah di Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

³⁷ *radarlombok.co.id*, 22/05/2018.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, skenario disiapkan dari hasil komunikasi dengan staf kepresidenan. Pertama, warga Ahmadiyyah disebar ke Rusunawa. Kedua, dibuatkan perumahan khusus. Terakhir, dikirim ke satu daerah menjadi transmigrant.

Tiga alternatif ini untuk memastikan bahwa warga Ahmadiyyah tidak dalam posisi pengungsi.³⁸

Petikan berita tersebut banyak menggunakan struktur kalimat pasif, '*disebar ke rusunawa*', '*dibuatkan perumahan*', dan '*dikirim ke satu daerah*'. Menurut Fairclough, struktur kalimat pasif berfungsi untuk mengurangi kata-kata yang berlebihan. Struktur pasif berfungsi untuk menekankan bahwa subjek sudah diketahui oleh publik. Jadi tanpa perlu menyebutkan pelakunya, publik sudah tahu siapa yang melakukannya³⁹. Dalam konteks pemberitaan, ketiga kalimat pasif tersebut telah dipahami dilakukan oleh pemerintah kota Mataram. Ketiganya diulang sebanyak tiga kali. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan nasib jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Secara birokrasi, ini tidak salah. Di bawah undang-undang desentralisasi, pemerintah pusat telah memberikan hak kepada kota-kota di Indonesia untuk mengatur daerahnya sendiri.

Berita tersebut mengutip kata '*pengungsi*' sebanyak dua kali. Kedua kalimat tersebut disusun dalam struktur kata negatif. Kalimat pertama berbunyi '*Pemerintah Kota Mataram akan menolak menampung pengungsi warga Ahmadiyah*'. Pengungsi Ahmadiyah dalam kalimat tersebut menjadi objek dari frase negatif '*menolak*' yang bersinonim dengan '*tidak menerima*'. Pada kalimat kedua, Ahmadiyah juga dirangkai dalam kalimat negatif, namun kali ini sebagai subjek, '*Ahmadiyyah tidak dalam posisi pengungsi*'. Dalam hal ini, media memposisikan pemerintah daerah sebagai pihak yang ingin menghilangkan stigma '*korban*' dari pihak Ahmadiyah. Namun, tidak memungkiri tujuan lain bahwa penghilangan stigma oleh pemerintah kota itu semata hanya ingin menghilangkan label '*daerah pengungsian*' dari kota Mataram.

³⁸ *suarantb.com*, 22/05/2018.

³⁹ Fairclough, *Language and Power*, 104.

Pemberitaan mengenai resolusi konflik Ahmadiyah oleh aktor negara juga muncul dalam berita yang ditulis oleh *suarantb.com* dengan tajuk '*TGB Ajak Warga Greneng dan Ahmadiyyah Jaga Persaudaraan*'. Dalam kutipannya, *suarantb.com* menulis;

Sementara itu, di Mapolres Lotim, gubernur berdialog dengan sejumlah warga Ahmadiyyah yang ditampung. Gubernur mengatakan, akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja, kata TGB, perlu waktu karena masalah tersebut tidak sederhana seperti yang dibayangkan.

Meskipun peristiwa itu sudah terjadi, TGB berharap kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sebab, kalau terjadi akan berdampak pada pembangunan serta nama baik daerah. "Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang kita harapkan," ujarnya.⁴⁰

Ada modalitas '*hanya saja*' dalam pernyataan TGB terkait penyelesaian kasus Ahmadiyah. Dalam hal ini, TGB selaku gubernur Nusa Tenggara Barat digambarkan sebagai pihak yang skeptis. Artinya, sulit menemukan titik terang dalam penyelesaian kasus Ahmadiyah. Bingkai skeptis ini tidak tercermin dalam dialog TGB dengan warga Greneng. Dalam salah satu perbincangan, TGB menyebut soal pembangunan dan reputasi daerah dalam frase '*Sebab, kalau terjadi akan berdampak pada pembangunan serta nama baik daerah*'. Dalam hal ini TGB selaku pemegang kekuasaan tertinggi di NTB tidak percaya penuh pada kasus Ahmadiyah di Lombok Timur. Kedua, TGB lebih mementingkan bagaimana daerah lain melihat perkembangan dan citra NTB, wilayahnya. Dalam arti lain, reputasi TGB sebagai gubernur NTB tidak dibingkai dari soal penyelesaian kasus Ahmadiyah, melainkan bagaimana NTB mengelola pembangunan sehingga mendapat citra dan pengakuan positif dari daerah lain.

Dalam hal ini, wacana mitigasi Ahmadiyah bukan diletakkan pada soal hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun soal citra daerah saat terjadi konflik. Dalam dialog tersebut, media mengutip pernyataan Gubernur NTB tentang pentingnya menjaga nama baik daerah. Salah satu caranya adalah dengan

⁴⁰ *suarantb.com*, 22/05/2018.

menjaga kerukunan dan semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Di satu sisi, ini penting untuk mengharumkan nama daerah NTB. Namun, di sisi lain, wacana ini lebih menekankan pada marginalitas Ahmadiyah. Kerukunan bersyarat ini menuntut Ahmadiyah untuk tetap waspada karena keharmonisan yang dibangun hanya berorientasi pada citra daerah, alih-alih melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jika persekusi itu akhirnya bisa dipadamkan melalui imbauan gubernur, wacana '*kerukunan*' tidak akan menjawab persoalan yang lebih mendasar, yakni berlanjutnya stigma bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan meresahkan.

Simpulan

Melalui pisau analisis wacana kritis Fairclough, penelitian ini menemukan adanya hubungan dialektis antara bahasa dan kohesi sosial. Tiga media di Nusa Tenggara Barat secara sepakat mengidentifikasi Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam berdasarkan fatwa MUI tentang fatwa kesesatan Ahmadiyah. Dalam hal ini, Ahmadiyah menjadi objek mediatisasi agama di mana ketiga media menjadi sumber penting pembawa ideologi yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak serta menegaskan sebuah *status quo* dengan ideologi yang diusung. Saat memberitakan tentang persekusi Ahmadiyah di Lombok Timur, ketiga media mendayagunakan narasi viktimisasi yang relatif kuat. Narasi ini mengasumsikan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sangat lemah dan rentan sehingga masih membutuhkan pihak lain untuk membantu diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, media juga membingkai Ahmadiyah sebagai dalang dari semua konflik yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Implikasi dari wacana ini adalah bahwa jika Ahmadiyah tidak segera diluruskan atau dikembalikan kepada ajaran Islam yang benar, maka konflik seperti penyerangan dan penganiayaan akan terus terjadi.

Terkait peran pemerintah daerah terkait konflik Ahmadiyah di Lombok Timur, media membingkai bahwa penyelesaian konflik Ahmadiyah adalah bagian dari menjaga citra dan reputasi provinsi Nusa Tenggara Barat. Asumsi ini setidaknya berangkat dari dua indikasi. *Pertama*; Pemerintah Kota ingin menghapus label Kota Mataram sebagai '*daerah pengungsian*'. *Kedua*; dialog Gubernur NTB, Tuan

Guru Bajang, dengan warga Greneng menyentuh topik pembangunan dan reputasi daerah. Di satu sisi, *framing* ini dinilai mampu meredam potensi konflik horizontal antar keyakinan. Namun, di sisi lain, upaya penyelesaian konflik Ahmadiyah tampak tidak tulus dan tidak menyentuh aspek fundamentalnya. Artinya visi daerah menjadi faktor utama bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik, bukan kebebasan beragama dan berkeyakinan jemaat Ahmadiyah.

Media juga menciptakan wacana pada tataran praktik sosial bahwa selama Ahmadiyah berpegang teguh pada ajarannya dan tidak kembali (bertobat) pada ajaran Islam yang sebenarnya, maka mereka tidak akan mendapat tempat di masyarakat. Dalam bahasa lain, masyarakat akan menerima mereka jika mereka mau bertobat. Wacana ini terlihat saat media mengutip pernyataan anggota Komisi III DPRD Lombok Timur, Martawani. Seperti dikutip *suarantb.com* dalam tajuk '*Solusinya bagaimana mengembalikan pemahaman mereka, mereka harus kembali ke ajaran Islam yang benar. Diberi tempat tinggal khusus bukan solusi bagi mereka*'. Narasi ini diperkuat oleh pernyataan Gubernur NTB '*Gubernur mengatakan akan menyelesaikan masalah. Namun, kata TGB, itu akan memakan waktu. karena masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan*'. Narasi-narasi ini membentuk wacana yang kuat karena media memberikan ruang yang luas bagi aktor-aktor negara untuk berbicara. Wacana ini pada akhirnya tetap tidak menyentuh pada aspek mendasar konflik yaitu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan karena wacana yang terbentuk adalah bahwa solusi yang tepat untuk mengurangi potensi konflik sosial adalah mengembalikan jemaat Ahmadiyah pada ajaran Islam yang benar, bukan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah jemaat Ahmadiyah yang rusak.

Ucapan Terima Kasih

Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada *Center for Religious and Cross-cultural studies* (CRCS) yang telah memberikan beasiswa studi di Program Studi *Center for Religious and Cross-cultural studies* (CRCS), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM). Kedua, terima kasih kepada Frans Wijzen selaku dosen pengampu mata kuliah *Critical Discourse Analysis* serta Suhadi dan Zainal Abidin Bagir selaku dosen pembimbing akademik penulis

di UGM yang telah memberikan ide, gagasan, serta wacana-wacana kritis terkait isu-isu sosial keagamaan di Indonesia sehingga memberikan inspirasi kepada penulis untuk menulis artikel ini. Terakhir, terima kasih kepada Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan ide dan gagasan sederhana sehingga tulisan singkat ini dapat dibaca oleh publik

Daftar Pustaka

- Amir, Andi Subhan, and Andi Muhammad Hasrum. "Ahmadiyah Dalam Potret Media Cetak (Analisis Isi Berita Surat Kabar Kompas, Republika, Dan Suara Pembaruan)." *Jurnal Komunikasi PROFETIK* 6, no. 1 (2013): 67–82.
- Andarini, Rindang Senja. "Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Ahmadiyah Pada Harian Jawa Pos." *Jurnal Interaksi* 3, no. 1 (2014): 85–93.
- Badarudin, Zulfikri, Abdul Rasyad, Syahrul Amar, and Bambang Eka Saputra. "Perkembangan Dan Eksistensi Surat Kabar Di Lombok Timur Tahun 1986-2013." *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* 8, no. 2 (2021): 25–44.
- Baker, Paul, and Sibonile Ellece. *Key Terms in Discourse Analysis*. New York: Continuum International Publishing Group, 2011.
- Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- . *Language and Power*. Second Edi. New York: Routledge, 2001.
- Halili, and Bonar Tigor Naipospos. *From Stagnation To PickThe New Hopes: The Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2014*. Edited by Ismail Hasani and Suryadi A. Radjab. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015.
- Hardiman, Francisco Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Heryanto, Gun Gun. "Polemik Ahmadiyah Di Media Online." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 10, no. 2 (2016): 174–198.
- Hjarvard, Stig. "Three Forms of Mediatized Religion Changing the Public Face of Religion." In *Mediatization of Religion: Nordic Perspective*, edited by Stig

Hjarvard and Mia Lovheim. Goteborg: Nordicom: University of Gothenburg, 2012.

Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies, 2018.

Thorsen, Einar, and Daniel Jackson. "Seven Characteristics Defining Online News Formats." *Digital Journalism* 6, no. 7 (2018): 847–868.

Wood, Julia T. *Communication Mosaics: An Introduction to the Field of Communication*. Boston: Cengage Learning, 2011.